

**THE IMPLEMENTATION OF AWARDING THE OWNER OR
MANAGING PARTY OF CULTURAL HERITAGE IN CITY OF
YOGYAKARTA BASED ON REGIONAL REGULATION
OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6 OF 2012
ON PRESERVATION OF CULTURAL LEGACY
AND CULTURAL HERITAGE**

By:

Fina Adlia,¹

ABSTRACT

This Legal Research is aimed to analyse (1) The practice of providing incentives and compensation as required in Article 66 of Regional Regulation of DIY No. 6 of 2012 on Preservation of Cultural Legacy and Cultural Heritage; (2) The problems occurred in the enforcement of providing incentives and compensation. Normative and empirical research methods are the basis used in this Legal Research that relies on field research and library research in answering the research questions. In order to obtain the data and information is analysed using the qualitative method.

The findings found that the implementations of the incentives and compensation have been done by the local government. However, there are obstacles in the implementation such as the different interpretation by responsible institution and the absence of Regional Regulation. These problems have resulted the cultural heritage in City of Yogyakarta has not been preserved properly.

Keywords: Cultural Heritage, Incentive and Compensation, Regional Regulation

¹ Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1-IUP 2015).

**IMPLEMENTASI TERHADAP PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PEMILIK ATAU PENGELOLA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA**

Oleh:

Fina Adlia,²

INTISARI

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa (1) praktek dari penyediaan insentif dan kompensasi seperti yang diatur dalam Pasal 66 dari Peraturan Daerah DIY No. 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; (2) masalah yang muncul saat pelaksanaan pemberian insentif dan kompensasi. Metode penelitian normatif dan empiris digunakan dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam pengambilan data dan informasi menggunakan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Penemuan yang ditemukan menunjukkan bahwa implementasi dari pemberian insentif dan kompensasi telah dilakukan. Namun, terdapat beberapa masalah yang muncul seperti perbedaan interpretasi oleh institusi yang bertanggung jawab dan tidak adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta mengenai Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Hal ini menyebabkan cagar budaya di kota Yogyakarta belum dilestarikan secara maksimal.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Insentif dan Kompensasi, Peraturan Daerah

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (S1-IUP 2015).